

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2011
- Alfred R. Liner, *Teknik Memimpin Karyawan dan Pengawal*, Terjemahan Imam Sarjono, Penerbit Gaya Sakti, Jakarta, 1962
- Arifin P., Soeria, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik, dan Kritik*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005
- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, *Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia*, 2013
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta, 2006
- Djoko Prakoso dan Ali Suryati, *Upetisme Ditinjau Dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi cetakan I tahun 1971*, Bina Aksara, Jakarta, 1986
- Indra Bastian dan Gatot Soepriyanto, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Buku 1, Salemba 4, Jakarta, 2002
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Manullang, *Dasar-Dasar Management*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977
- Maringan Masry Simbolon, *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004

- Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000
- Mohammad Noor Syam, *Sistem Falsafah Pancasila*, Refika Adhitama, Bandung, 2009
- Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Otje Salman, *Filsafat Hukum*, Refika Adhitama, Bandung, 2009
- Otto Ekstein, *Keuangan Negara*, Bina Aksana, Jakarta, 1981
- Revrisond Baswir, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. BPF, Yogyakarta, 1999
- Romli Atasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional & Internasional*, Sinar Grafika, Bandung, 2004
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Safri Nugraha, et. al., *Hukum Administrasi Negara* (Edisi Revisi), CLGS FH UI, Depok, 2003
- Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Managemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soekarno K, *Dasar-Dasar Manajemen*, Penerbit Miswar, Jakarta, 1968
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- Sondang P Siagian, *Administrasi Pembangunan*, Penerbit Gunung Agung, Jakarta, 1982
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Citra, Jakarta, 2005
- Sujamto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Sujanto, *Norma dan Etika Pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987
- Victor Situmorang dan Jusuf Juhir, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta, 2014
- Yuswanto, *Hukum Keuangan Negara*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
jo. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah
Non Departemen

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem
Pengendalian Intern Dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan
Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Peraturan Kepala BPKP Nomor: Per-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penusan
Bidang Investigasi

Nota Kesepahaman Antara Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI, dan BPKP
Nomor: 01/Kb/I-VIII.3/07/2007 tentang Kerjasama Dalam Penanganan
Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara Yang Berindikasi
Tindak Pidana Korupsi

Nota Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan dan Kejaksaan Agung
Nomor: 01/Kb/I-VIII.3/07/2007 Nomor: Kep-071/A/Ja/07/2007 tentang

tindak Lanjut Penegakan Hukum terhadap Hasil Pemeriksaan BPK Yang Diduga Mengandung Unsur Tindak Pidana

Nota Kesepakatan Bersama Antara BPK dan Kepolisian No: 1/KB/I-XIII.2/11/2008 No. Pol.: B/11/XI/2008 tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK yang terindikasi Tindak Pidana

Sumber Lainnya

Agung Suseno, *Eksistensi BPKP Dalam Pengawasan Keuangan Negara*, Vol. 17, No. 1 Tahun 2010

Akil Mochtar dalam makalah “*Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara*”. Disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU). Diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 30 Maret 2009

Alfath, Tahegga Primananda, *Kedudukan Badan Pemeriksaan Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, dalam e-Journal THE SPIRIT OF LAW, Vol. 1, No.1, Tahun 2015

Alfin Sulaeman, *Pihak Yang Berwenang Menilai Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi*, dalam <<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt57d7ba0cd90bb/pihak-yang-berwenang-menilai-kerugian-negara-dalamkasus-korupsi>>, diakses pada 29 Maret 2019

Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2011

Andry Novelino, *Hakim Sebut Kerugian Proyek e-KTP Sesuai Penghitungan BPKP*, dalam <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180104122629-12-266653/hakim-sebut-kerugian-proyek-e-ktp-sesuai-penghitungan-bpkp>>, diakses pada Kamis 7 Februari 2019

Andry Novelino, *Hakim Sebut Kerugian Proyek e-KTP Sesuai Penghitungan BPKP*, dalam <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180104122629-12-266653/hakim-sebut-kerugian-proyek-e-ktp-sesuai-penghitungan-bpkp>>, diakses pada Kamis 7 Februari 2019

Chandra Ayu Astuti, Anis Chariri, *Penentuan Kerugian Negara yang dilakukan Oleh BPKP dalam Tindak Pidana Korupsi*, Vol. 4, No. 3, Tahun 2015

- Dayat Hidayat, 2008, *Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Model Kelembagaan Lembaga Pengawas Daerah*, Wacana Kinerja, Vol. 11, No. 1, Tahun 2008
- Deutsche Welle*, Setya Novanto Ditetapkan Sebagai Tersangka, DW.COM., diakses pada 1 April 2019
- Ditjen Dukcapil Kemendagri, *Melayani Sepenuh Hati*, dalam <www.dukcapil.kemendagri.go.id>, diakses 1 April 2019
- Emerson Yuntho, *Penerapan Unsur Merugikan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta
- Fadhil, Rina Atriana, Haris, *Begini Alur Lelang dan Pelaksanaan e-KTP*, detiknews, diakses pada 1 April 2019
- Gerry Stoker, *The Politics of Local Government*, 2nd edition, The Macmillan Press, London, 1991
- Harian Waspada, diterbitkan pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2012
- Indonesia Corruption Watch, *Tren Penindakan Kasus Korupsi 2018*, dalam <<https://antikorupsi.org/id/tren/tren-penindakan-kasus-korupsi-2018>>, diakses pada Kamis 7 Februari 2019
- Indonesia Corruption Watch, *Tren Penindakan Kasus Korupsi 2018*, dalam <<https://antikorupsi.org/id/tren/tren-penindakan-kasus-korupsi-2018>>, diakses pada Kamis 7 Februari 2019
- Irfan Ridwan Maksum, *Pengawasan Intern Daerah Otonom*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Bisnis & Birokrasi, Vol. 14 No. 4 Desember, 2006
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam <<http://pusatbahasa.diknas.go.id>>, diunduh pada tanggal 25 Maret 2019
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam Jimly Asshiddiqie, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2004
- Lelang Pengadaan E-KTP Dilakukan Pertengahan Februari*, Republika Online, 1 April 2019

- Media, Kompas Cyber, *Kamis Pagi, Pengadilan Tipikor Gelar Sidang Perdana Korupsi E-KTP - Kompas.com, KOMPAS.com* (dalam bahasa Inggris), diakses pada 1 April 2019
- Mediatama, Grahanusa, *Pelayanan e-KTP mulai Agustus 2011*, kontan.co.id dalam bahasa Inggris, diakses pada 1 April 2019
- Meta, *Pemahaman Keuangan Negara*, <https://korup5170.wordpress.com/opiniartikel-pakar-hukum/pemahaman-keuangan-negara/>, diakses pada 1 April 2019
- Nia K. Winayanti, *Hand-out Pengertian Keuangan Negara*, FH Unpas, 2015
- Rita Novita Sari, *Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh BPKP Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 75 PK/TUN/2015)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016
- Ronny Sautma Hotma, *Kajian Seputar Problematika Keuangan Negara. Aset Negara. Dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan*, Pusat pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR-RI & Azza Grafika, Jakarta, 2013
- Stephen P. Rob-bins, *Organization Theory: Structure Designs and Applications*, 3rd edition, Prentice Hall, New Jersey, 1990. dalam Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
- Surat Dakwaan Irman, Kasus E-KTP
- Tim Taskforce, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta Pusat, 2008
- www.e-ktp.com/2011/05/kpk-pantau-proses-tender-proyek-e-ktp-di-kemendagri
- Yos Johan Utama, *Memahami Dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang*, Thafamedia. Yogyakarta, 2015
- Yudono Yanuar Akhmadi, *Setya Novanto Tersangka E-KTP, KPK: Tak Berhubungan dengan Pansus"*, Tempo, diakses pada 1 April 2019